

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Implementasi Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan Di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banyumas. Program ini merupakan inovasi ATR/BPN untuk memudahkan masyarakat yang tidak dapat mengurus tanah di jam kerja agar dapat mengurus dokumen pertanahannya secara mandiri. Namun, jumlah pemohon Pelataran pada implementasinya masih lebih rendah dari layanan di hari kerja dan cenderung menurun per tahunnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Pelataran di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banyumas dalam upaya peningkatan pelayanan publik, dikaji dengan teori implementasi menurut Ripley menggunakan pendekatan *what's happening*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dan *incidental sampling*. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pegawai dilibatkan dalam mengimplementasikan program Pelataran melalui mekanisme rotasi. Tujuan dari program juga telah jelas dipahami oleh semua pihak. Tetapi dalam implementasi program ini terdapat tantangan dari segi kesiapan dan penguasaan informasi oleh pegawai, partisipasi masyarakat yang masih rendah, keterbatasan anggaran yang mengakibatkan ketiadaan uang kompensasi, dan adanya “layanan loket prioritas” di hari kerja dengan sasaran yang sama. Selain itu, keberlanjutan program tidak ditentukan oleh hasil kinerja layanan di tingkat Kantor Pertanahan namun dari hasil evaluasi di tingkat pusat. Meskipun demikian, kebermanfaatan program Pelataran telah dirasakan bagi para pengguna didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran)

SUMMARY

This research entitled “The Implementation of Weekend Land Service (Pelataran) Program at the ATR/BPN Land Office of Banyumas Regency”. This program is an innovation to facilitate independent land administration for citizens unable to access services during working hours. However, the number of applicants for the Pelataran program remains lower than for regular weekday services and has shown a declining trend annually.

This study aims to analyze the implementation of the Pelataran program as an effort to enhance public service, examined through Ripley's implementation theory, utilizing the what's happening approach. A descriptive qualitative method was employed, with informants selected through purposive and incidental sampling, and data collected via interviews, observation, and documentation.

The results show that all employees are involved in implementing the Pelataran program through a rotation mechanism, and its objectives are clearly understood. However, the implementation faces significant challenges: the readiness of rotating staff, low public participation, budget limitations causing a lack of overtime compensation, and a competing “priority counter service” on weekdays targeting the same audience. Furthermore, the program's sustainability is not determined by local performance but by central-level evaluation. Nevertheless, the program's benefits have been tangibly felt by its users, supported by adequate infrastructure.

Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Weekend Land Service Program (Pelataran)